

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Chairunnisa Amelia

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Corresponding Author : chairunnisaamelia@umsu.ac.id

Abstrak

Karya ilmiah ini membahas mengenai permasalahan Pendidikan di Indonesia dilihat dari sudut pandang dimensi kepemimpinan dan kesenjangan pendidikan. Hal yang mendasar bagi pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh dimensi kepemimpinan dan pemerintah. Sedangkan tantangan pendidikan yang semakin kompleks saat ini, Pendidikan harus mendapatkan perhatian lebih, karena melalui pendidikan dapat menjadi indikator maju atau mundurnya suatu bangsa di negara tersebut. Masalah Pendidikan harus dapat dengan peran serta pemimpin, karena pemimpin adalah determinan arah suatu kebijakan. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyedia pendidikan diharapkan dapat mengatasi masalah yang memungkinkan terjadinya kesenjangan dalam pendidikan.

Kata kunci: Dimensi Kepemimpinan, Kesenjangan Pendidikan

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman selalu menampilkan persoalan baru yang kerap tidak terpikirkan sebelumnya. Cita-cita kemerdekaan yang diusung oleh para pendiri bangsa menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melanjutkan tonggak-tonggak perjuangan pergerakan nasional tersebut. Proses pendidikan yang telah dijalani selama hampir 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak serta merta membuat perubahan secara signifikan terhadap pola pikir sumberdaya manusianya. Mencerdaskan kehidupan bangsa¹ sebagai salah satu *icon* penting kehidupan bermasyarakat perlu terus dilakukan pembaharuan menuju masa depan yang baik kedepannya. Indonesia dahulu dipuji sebagai salah satu negara yang berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia secara fantastis. Pada era 60-an banyak tenaga pendidik/pengajar yang berasal dari Indonesia diperbantukan untuk memberikan pengajaran di Negara tetangga dan ada juga mahasiswa dari negara tetangga menempuh studi di Indonesia.²

Pendidikan menurut Undang Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) dijelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata "didik" dan mendapat imbuhan berupa awalan 'pe' dan akhiran 'an' yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa adalah perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran.

Pendidikan merupakan usaha *etis* dari manusia, untuk manusia dan untuk masyarakat manusia. Pendidikan dapat mengembangkan bakat seseorang sampai pada tingkat optimal dalam batas hakikat individu, dengan tujuan agar setiap manusia dapat secara terhormat ikut serta dalam pengembangan manusia dan masyarakatnya dapat terus menerus mencapai martabat kehidupan yang lebih tinggi.³ Pendidikan tidak dapat dipisahkan pada diri manusia. Manusia mengalami proses pendidikan dimulai dari kandungan sampai beranjak dewasa selanjutnya menjadi tua. Pendidikan merupakan cahaya yang menuntun manusia dalam menentukan arah, tujuan, dan arti kehidupan ini.

Problematika pendidikan di Indonesia dinilai cukup banyak, mulai dari kurikulum, kompetensi, bahkan kompetensi kepemimpinan baik itu di jajaran tingkat atas maupun tingkat bawah. Berbagai keluhan yang terjadi di lapangan, baik pimpinan sekolah maupun para pendidik yang menyangkan dimensi kepemimpinan seperti persoalan manajemen, administrasi yang belum sesuai, birokrasi dan kedisiplinan. Tidak kalah pentingnya mengenai persoalan kepemimpinan di sekolah turut berperan mewarnai wajah penyelenggaraan dunia pendidikan dan memperlebar kesenjangan serta konflik internal para pendidik. Pemberlakuan otonomi daerah menyumbang persoalan dimana sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan penyesuaian dan perubahan agar tercipta proses pendidikan yang demokratis, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat serta memperhatikan keberagaman dan kebutuhan daerah.

Permasalahan pendidikan di Indonesia dirasakan setiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga aras ini idealnya saling terkait satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan

¹ Moh. Wardi, "Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya." *Tadris*, 1 (Juni, 2013) hlm., 55.

² Musthofa Rembagy, *Pendidikan Transformatif Pergulatan Kritis merumuskan pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 4.

³ Slamet Imam santoso, *Pendidikan di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), hlm. 98.

dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran mempengaruhi hasil output. Selanjutnya, output berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau masuk ke dalam dunia kerja, dimana teori mulai dipraktikkan.

Permasalahan umum yang terjadi pada aras input yaitu penerimaan siswa baru di sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas peserta didik, bukan mengejar laba. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pendidikan di Indonesia sudah menjadi hal yang prestisius bagi beberapa kalangan. Berapa besarnya biaya pendidikan yang dibebankan pihak sekolah, atas nama gengsi dan harapan yang besar akan gelar kesarjana yang dapat meroketkan martabat keluarga, akan dikeluarkan. Namun, bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, persoalan masuk sekolah bukan mengenai gengsi, akan tetapi kemampuan atau ketidakmampuan biaya pendidikan. Bahkan sudah menjadi pemandangan wajar, setiap tahun ajaran baru, Perusahaan Pegadaian menerima gadaian dari orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya berupa barang elektronik, perhiasan dan barang lainnya yang berharga. Penerimaan siswa baru di sekolah negeri seharusnya membebaskan biaya bagi calon orangtua murid. Namun pada kenyataannya masih ada ditemukan pungutan liar dengan alasan uang 'titipan' agar si anak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan.

Dewasa ini muncul banyak kritik baik dari masyarakat Indonesia baik dari segi pengamat pendidikan maupun dari kalangan praktisi pendidikan bahwa pendidikan nasional tidak mempunyai arah yang jelas. Ketiadaan arah yang jelas dalam pendidikan nasional menunjukkan hilangnya *elan vital* di dalam pendidikan nasional yang menggerakkan sistem pendidikan untuk mewujudkan cita-cita bersama Indonesia raya.⁴ Oleh sebab itu tulisan ini membahas tentang problematika pendidikan nasional yang dilihat dari beberapa hal yaitu: 1) Pengertian dan fungsi pendidikan, 2) Dimensi kepemimpinan, 3) Kesenjangan pendidikan.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Fungsi Pendidikan

Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina dan membentuk kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan terus mengalami perkembangan, meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Lebih jauh dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan adalah: a) usaha (kegiatan) usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar, b) ada pendidik, pembimbing atau penolong, c) ada yang didik atau si terdidik, d) bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan, e) dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan.⁵

Sementara dalam Undang-undang Sisdiknas dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁶

Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli

1. *Ki Hadjar Dewantara*

Pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

2. *Plato*

pendidikan adalah proses yang dilakukan seumur hidup (life-long) yang dimulai dari seseorang lahir hingga kematiannya, yang membuat seseorang bersemangat dalam mewujudkan warga negara yang ideal dan mengajarkannya bagaimana cara memimpin dan mematuhi yang benar. Plato pun menambahkan bahwa pendidikan tidak hanya menyediakan ilmu pengetahuan dan kemampuan akan tetapi nilai, pelatihan insting, membina tingkah laku dan sikap yang benar. Pendidikan yang sejati (true education), akan memiliki kecenderungan terbesar dalam membentuk manusia yang beradab dan memanusiakan manusia dalam hubungan mereka bermasyarakat dan mereka yang berada dalam perlindungannya.

3. *Comenius*

pada abad pertengahan, bahwa pendidikan adalah proses dimana individu mengembangkan kualitasnya terhadap agama, ilmu pengetahuan dan moralnya, yang membuatnya mampu mengklaim dirinya sebagai manusia.

4. *Martinus Jan Langeveld*

⁴ H.A.R Tilaar. *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 14

⁵ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 3

⁶ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (*UU RI Nomor 20 Tahun 2003*), Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 2

Pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.

5. *Gunning dan Kohnstamm*

Pendidikan adalah proses pembentukan hati nurani. Sebuah pembentukan dan penentuan diri secara etis yang sesuai dengan hati nurani

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁷

Dari paparan di atas dapat dikemukakan bahwa fungsi pendidikan itu merupakan proses yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan itu harus berjalan dalam hal menjaga keberlangsungan hidup manusia. Tanpa pendidikan tidak akan ada transformasi pengetahuan serta nilai-nilai dan norma sosial dari generasi ke generasi berikutnya.

Dimensi Kepemimpinan

Pemimpin adalah orang yang paling mempengaruhi perilaku dan keyakinan kelompok. Dia adalah orang yang memulai aksi, memberi perintah, mengambil keputusan, berperan sebagai suri tauladan dan berada di garis depan kelompok.

Bangsa Indonesia, sejak merdeka hingga saat ini mengalami beberapa pergantian model kepemimpinan, diantaranya adalah orde lama, orde baru dan orde reformasi. Dimana setiap ordenya memberikan kontribusi dan membantu menentukan corak pendidikan saat ini.⁸ Kalau dilihat lebih dalam tentang aspek politik pendidikan, pendidikan diorientasikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ideologi dan kepentingan politik untuk mempertahankan status *quo*.

Para pemimpin memiliki kadar yang tinggi atau rendah dalam tiap-tiap dimensi tersebut. Selain itu, pemimpin juga bervariasi dalam dua dimensi penting lainnya yaitu: (Muczyk & Reimann, 1987; Peterson, 1997)

1. **Otokratik-partisipatif:** seberapa jauh pemimpin membuat seluruh keputusannya sendiri atau apakah ia memperbolehkan partisipasi dari anggota-anggota kelompok
2. **Permisif-terarah:** seberapa jauh pemimpin berusaha menjalankan tugasnya dengan cara memberikan pengarahan langsung dalam aktivitas kelompok

Dewasa ini pendidikan nasional merupakan subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis. Hal ini mengartikan pendidikan telah dimasukkan didalam kancah perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik. Pendidikan tidak lagi untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, akan tetapi untuk membangun kekuatan dari partai politik praktis tertentu untuk kepentingan golongan ataupun kelompoknya sendiri. Kebijakan otonomi daerah, akan membawa implikasi yang sangat besar perannya dalam berbagai tatanan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak terkecuali pada bidang pendidikan.

Pada suatu pemerintahan, ketika terjadi pergantian menteri hampir selalu diikuti dengan pergantian kurikulum, orientasi kurikulum yang diterapkan pun dilandasi oleh *background* pendidikan sang menteri.⁹ Pergantian kurikulum tersebut memang tidak serta merta menjadi permasalahan, karena pergantian kurikulum diharapkan materi pembelajaran akan lebih baik dan lebih bermuatan jawaban kepada tantangan global, namun yang dianggap menjadi permasalahan adalah ketika kurikulum tersebut tidak diimbangi oleh porsi muatan humanisme. Pergantian kurikulum sebenarnya akan menambah beban tersendiri bagi orang tua dalam hal pembiayaan pendidikan. Karena secara otomatis jika pergantian kurikulum akan cenderung ganti buku, dan dengan sendirinya pengeluaran biaya terhadap pembelian buku anak akan meningkat.

Bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang baru ini diharapkan akan lebih dapat memikirkan dan berpihak pada kemajuan pendidikan, apalagi dengan kebijakan saat ini tentang terbentuknya kementerian pendidikan dasar dan menengah dan kementerian riset dan pendidikan tinggi membawa angin segar dengan harapan perubahan dan kemajuan bangsa ini.

Tentunya kita sebagai rakyat berharap banyak terhadap pemimpin yang baru ini dapat melakukan transformasi pendidikan sehingga problematika dibidang pendidikan dapat terselesaikan paling tidak ada perubahan kearah yang lebih baik untuk kemajuan bangsa ini.

Pendidikan merupakan kunci pembangunan nasional,¹⁰ oleh karena itu peranan kepemimpinan dalam dunia pendidikan sangat penting dalam membuat arah dan implementasi kebijakan pendidikan. Harus diakui bahwa masalah pendidikan termasuk masalah yang sulit untuk diatasi. Berbagai macam kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah,

⁷ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (*UU RI Nomor 20 Tahun 2003*), Op cit, hlm. 5

⁸ Musthofa Rembangy . *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 20.

⁹ Udin Syaefudin, *Inovasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 87.

¹⁰ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 58.

<http://seminasfis.unimed.ac.id>

walaupun dalam prakteknya walaupun masih ada kekurangan, akan tetapi usaha pemerintah perlu kita hargai untuk berbagai problematika pendidikan tersebut.

Seiring dengan era globalisasi, pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia dituntut untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya dalam menghadapi persaingan global. Dunia pendidikan harus tanggap menjawab tuntutan perkembangan zaman yaitu dengan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai. Pendidikan sebagai bentuk investasi dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Harapan yang besar bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pendidikan dalam rangka reformasi pendidikan nasional kearah yang lebih baik.

Kesenjangan Pendidikan

Pendidikan di Indonesia masih menunjukkan kualitas yang rendah. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dianggap kurang seriusnya peran serta Pemerintah dan pihak terkait lainnya memperhatikan bidang pendidikan. Kemajuan peradaban suatu bangsa salah satunya yang dinilai adalah pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk kemajuan suatu bangsa. Kesenjangan-kesenjangan yang masih terjadi dalam pendidikan Indonesia seperti: sarana prasarana dan sumber daya tenaga pendidik.

1) Sarana Prasarana

Kualitas pendidikan antara sekolah yang di kota dan daerah terpencil masih terdapat kesenjangan cukup besar. Sering kita lihat secara langsung maupun lewat pemberitaan dimedia televisi, media sosial lainnya dan surat kabar bahwasanya kondisi sekolah di pedesaan dan daerah terpencil masih jauh dari kata layak. Misalnya kondisi bangunan yang rapuh bahkan hampir runtuh ditambah atap yang bocor disaat musin hujan sehingga kegiatan proses belajar mengajar sering terkandala. Persoalan sarana dan prasarana menjadi persoalan yang krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia.

Kerusakan sarana prasana pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium yang tidak menunjang proses pembelajaran kondusif menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karena proses pendidikan berlangsung tidak efektif.

Bantuan Pemerintah seperti rehab ruangan kelas belum menjangkau secara keseluruhan. Prosesnya hanya bagian tertentu saja seperti atap dan pengecatan. Kesenjangan lainnya juga pada jumlah dan ketersediaan buku, ketersediaan buku di daerah perkotaan, daerah terpencil maupun perbatasan masih terjadi kesenjangan baik dari segi jumlah ketersediaan dan kualitas buku. Ketersediaan buku merupakan penunjang pendidikan yang sangat penting karena hal ini akan menunjang keberhasilan proses pendidikan.

Pembenahan pendidikan tidak terlepas dari ketercukupan dana dan pengelolaan yang baik. Masyarakat berharap banyak dengan pemberlakuan otonomi pendidikan sebagai salah satu kebijakan pendidikan nasional dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Otonomi pendidikan diharapkan menghasilkan sistem pendidikan yang terbuka, lebih mandiri, demokratis dan maju..

2) Masalah Kurikulum

Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami Indonesia. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya terhadap pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Sumber masalahnya ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja (bagi yang tidak melanjutkan sekolah) dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk ke perguruan tinggi (bagi mereka ingin lanjut).

Berikut ini adalah beberapa masalah kurikulum:

a. Kurikulum pendidikan Indonesia terlalu kompleks

kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kurikulum pendidikan di negara maju.. Hal ini memiliki dampak bagi guru dan siswa. Siswa merasa terbebani dengan segudang materi yang harus pahami dan dikuasainya. siswa dihadapkan dengan usaha yang keras untuk memahami dan mengejar materi yang ditargetkan. Kedua hal tersebut akan nantinya adakn berdampak pada ketidakpahaman siswa terhadap keseluruhan materi yang diajarkan.

Tugas guru semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Guru tentunya akan terbebani dengan pencapaian target materi yang akan diajarkan. Guru harus melanjutkan materi sekalipun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan. Hal ini tidak sesuai dengan peran guru.

3) Tenaga Pendidik

Kuantitas maupun kualitas guru pada dewasa saat ini merupakan hal yang dilematis. Secara objektif jumlah guru saat ini memang kurang memadai, jumlah guru yang kurang memadai ini umumnya terjadi di daerah pedesaan, terpencil dan perbatasan, jumlah guru hanya ada sekitar 3-4 orang. Sementara itu, sekolah di daerah perkotaan dapat terus bertahan dengan kemajuan sarana dan prasarannya yang memadai dan ketersediaan bahkan penumpukan guru. Dalam satu SD

dijumpai 11- 17 orang guru, termasuk diantaranya kepala sekolah. Oleh karena itu sekolah yang kekurangan guru di pedesaan/daerah terpencil semakin terisolasi dan semakin terpuruk.

Dalam pendidikan Posisi guru memegang peranan penting. Dari segi kuantitas dan pemerataan guru mengalami persoalan yang dilematis, kondisi geografis negara kita yang sangat luas mejadi satu faktor kesenjangan pemerataan guru di Indonesia, ada sekolah yang kelebihan guru tetapi ada juga sekolah yang kekurangan guru.

Oleh karena itu, pemerintah harus membuat terobosan dalam membangun pendidikan nasional, artinya harus ada upaya pemerataan dan kualitas guru di Indonesia. Misalnya; ada semacam ransangan bagi guru yang mau mengabdikan diri bagi daerah/desa yang masuk kategori terpencil yaitu berupa tunjangan khusus sehingga ada semacam ukuran *cost* dan *benefid* bagi guru dari sudut rasional dan tuntutan sosial

PENUTUP

Pendidikan merupakan tolak ukur maju mundurnya suatu bangsa. Tentunya bangsa Indonesia tidak mau hidup terbelakang akibat aspek pendidikan tidak mendapat porsi yang cukup seiring dengan kemajuan dibidang lain.

Di Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional, beberapa sistem pendidikan Indonesia yang telah dilaksanakan, di antaranya adalah Sistem Pendidikan yang berorientasi pada nilai, sistem pendidikan terbuka, Sistem pendidikan beragam, Sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu, Sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman.

Pada dasarnya ada beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia yaitu mengenai bagaimana pengupayaan agar semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan serta pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan yang diprioritaskan penanggulangannya di Indonesia yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevansi pendidikan dan sarana prasarana.

Hal yang mendasar bagi pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh dimensi kepemimpinan atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan pada gilirannya untuk memberdayakan dan membangun manusia Indonesia melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pemimpin harus merata kesetiap daerah sehingga kesenjangan tidak lagi terjadi. Namun kita harus menyadari masalah pembangunan pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak.

REFERENSI

- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007.
- Rembagy, Musthofa. *Pendidikan Transformatif Pergulatan Kritis merumuskan pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Santoso, Slamet Imam. *Pendidikan di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Syaefudin, Udin. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tilaar. H.A.R. *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Triwiyanto, Teguh. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (UU RI Nomor 20 Tahun 2003) Jakarta: Sinar Grafika . 2003.
- Wardi, Moh. "Problematikan Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifmya." *Tadris*. 1. Juni 2013